BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional pada hakikatnya muncul dari, dilakukan oleh, dan ditujukan untuk rakyat dalam semua aspek kehidupan yang meliputi aspek ekonomi, politik, keamanan dan sosial budaya. Pembangunan nasional merupakan kehendak seluruh bangsa untuk terus menerus melakukan peningkatan terhadap taraf kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata. Berpegang pada itu semua, setiap warga Negara berhak atas taraf kesejahteraan yang layak dan memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam proses mewujudkan cita-cita bangsa dalam hal tersebut. Dalam upaya pembangunan senantiasa membawa aspirasi dan tuntutan baru dari masyarakat untuk mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik.

Sebuah Negara dapat dikatakan sukses dalam pembangunan nasional apabila memiliki banyak lapangan pekerjaan, mengurangi tingkat kemiskinan dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Namun untuk mampu menciptakan itu, sebuah Negara harus cerdas dalam mengelola dan mengatur sistem ekonomi dan memanfaatkan apa yang sudah dimiliki di Negara tersebut agar dapat memiliki nilai ekonomis. Setiap Negara pasti memiliki keunikan tersendiri dan kelebihan masing-masing. Misalnya Indonesia yang memiliki berbagai macam keunggulan dibanding

Negara-Negara lain yaitu sumber daya alam yang melimpah dan hampir semua wilayah yang agraris. Hal ini memberikan peluang kepada Indonesia untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya. Maka dari itu, kegiatan ekonomi sangatlah penting dan erat kaitannya dengan potensi yang ada disuatu Negara.

Indonesia adalah Negara yang kaya akan sumber daya alam, namun kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan ekonomi dan pendidikan masih mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehadiran Negara untuk menciptakan kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh rakyat masih belum juga terwujud. Peranan pemerintah dan pelaku ekonomi sangat menentukan terwujudnya cita-cita Negara untuk menciptakan masyarakat yang makmur secara berkeadilan dan berkesinambungan. Pemerintah dengan kekuasaannya dapat mengatur, mengawasi, dan memberi pengarahan yang insentif agar pelaku ekonomi dapat berperan secara optimal untuk kepentingannya sendiri tanpa mengabaikan tanggungjawabnya kepada pemerintah dan masyarakat.

Membangun suatu Negara dari pinggiran dilakukan dengan memperkuat daerah-daerah kecil dalam kerangka Negara kesatuan seperti halnya desa adalah merupakan sembilan program Nawacita Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Hal ini dipandang strategis untuk suatu langkah dalam menciptakan Negara yang makmur dan menjadi tonggak dalam menghadapi persaingan global saat ini. Desa merupakan bagian wilayah terendah dan sudah biasa dipandang sebagai daerah miskin menjadikan

pemerintah memiliki tugas untuk memberi perhatian yang besar membantu desa dalam mengurangi kemiskinan. UU No. 4 tahun 2014 menyebutkan bahwa Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Desa memiliki hak dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dan berperan dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Masyarakat desa saat ini sudah mengupayakan dalam mengelola sumber daya alam yang direncanakan akan berdampak baik pada peningkatan pendapatan desa. Namun hingga saat ini masih terdapat kendala atau hambatan yang dirasakan masyarakat desa maupun perangkat desa dalam mengembangkan sumber daya alam yaitu masalah keuangan dan minimnya sumber daya manusia yang berkualitas sehingga tidak mampu dalam hal pengolahan. Melihat fenomena diatas pemerintah memiliki upaya dengan membentuk BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Istilah BUMDes sendiri muncul pada Undang-undang No. 6 Tahun 2014.[1] Jadi BUMDes dapat meringankan masyarakat dalam hal permodalan dan menjadi stimulus dalam mendorong ekonomi masyarakat desa secara lebih intens.

Pada bulan Maret 2018, jumlah penduduk miskin di Jawa Timur mencapai 4.332,59 ribu jiwa (10,98 persen), berkurang sebesar 72,68 ribu jiwa dibandingkan dengan kondisi September 2017 yang sebesar 4.405,27

[1] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

ribu jiwa (11,20 persen).[2] Salah satu upaya pemerintah Jawa Timur yaitu dengan memaksimalisasi dana desa yang dikucurkan untuk program-program seperti halnya mendirikan BUMDes di tiap-tiap daerah yang diyakini bisa menjadi solusi pengentasan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Dana desa selain digunakan untuk infrastruktur seperti jalan dan jembatan, dana tersebut bisa digulirkan melalui kelompok-kelompok usaha ekonomi kreatif khususnya melalui BUMDes yang sudah di inisiasi oleh Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Namun BUMDes yang dirancang sebagai ujung tombak dalam pembangunan ekonomi desa masih banyak yang mati sebelum berperang, sehingga keberadaan BUMDes masih belum berjalan efektif dan mampu memberikan kontribusi positif bagi pelaksaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Seperti studi yang dilakukan oleh Prasetyo (2016) bahwa keberadaan BUMDes di desa Pejambon Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro justru mengalami situasi sulit dan banyak yang dalam perjalanannya tidak membuahkan hasil. Berbagai kendala telah diteliti dan menemukan banyak variabel penyebab yang menjadikan BUMDes tidak bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan.[3]

Penelitian yang dilakukan oleh Siswahyudianto dan Suselo menyatakan bahwa yang awalnya Badan Usaha Milik Desa Cakra Usaha di Desa Tapan

---

[2] https://jatim.bps.go.id diakses pada 2/1/2019 pukul 10.20 WIB

[3] Ratna Azis Prasetyo, "Peranan BUMDES dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pejambon Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro", *Jurnal Dialektika*, Vol. 9, No.1, 2016, hal. 98.

ini adalah peleburan dari Gerdu Taskin yang masih mempunyai 1 unit usaha simpan pinjam. Namun setelah dilebur menjadi Badan Usaha Milik Desa unit usaha itupun juga pertambah yaitu unit usaha di bidang perdagangan, pertanian, peternakan, perikanan dan jasa online.[4] Jadi, bisa dilihat bahwa Badan Usaha Milik Desa bertujuan sebagai penggerak inovasi produk yang ada disebuah daerah itu sendiri dan akan didapatkan hasil yang maksimal asalkan masyarakatnya dapat mengelola dengan baik.

Di Kabupaten Blitar dari 200 BUMDes yang ada, hanya 65 yang masuk dalam kategori BUMDes sehat. Bupati Blitar, Drs. H. Rijanto, MM saat membuka Gathering BUMDes di Kampung Coklat mengatakan bahwa BUMDes tidak sehat segera berbenah dan agar segera ditata kembali sehingga dapat berjalan sesuai fungsinya dapat berprestasi, menjadi motivasi untuk berkontribusi menyejahterakan masyarakat. Karena BUMDes sebagai lokomotif pembangunan ekonomi lokal tingkat desa. [5] Seperti yang diketahui BUMDes yang dapat memberi contoh bagi BUMDes lain yaitu antara lain BUMDes Kedung Banteng , BUMDes Maju Makmur Minggirsari sebagai pilot project BUMDes se-Indonesia bagian Timur dan juga BUMDes Lestari Karangsono yang pernah mendapatkan juara 1 Tingkat Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2017.

Selepas dari permasalahan diatas, terdapat salah satu daerah yang ada di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar yaitu Desa Karangsono. Desa

---

[4] Siswahyudianto dan Dedi Suselo, "Strategi Pemberdayaan Inovasi Produk Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Tulungagung", *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 2, 2019, Hal. 196.

[5] www.blitarkab.go.id diakses pada 3/1/2019 pukul 12.35 WIB

Karangsono mengalami peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun. Pengangguran dengan jumlah penduduk terbesar diraih oleh ibu rumah tangga. Sebagai upaya mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran di Desa Karangsono tepat pada tanggal 14 Februari 2011 pemerintah Desa Karangsono mendirikan suatu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan dikeluarkannya Perdes No. 10 Tahun 2011 dengan No. Notaris 127 tanggal 17 Maret 2011. Tabel tingkat pengangguran Desa Karangsono adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

Tingkat Pengangguran Desa Karangsono[6]

Tingkat Pengangguran	
Pengangguran (usia 18-56 tahun)	**Jumlah penduduk**
Angkatan kerja	22 orang
Masih sekolah dan tidak bekerja	84 orang
Ibu rumah tangga	980 orang
Bekerja penuh	750 orang
Bekerja tidak tentu	44 orang
Cacat dan tidak bekerja	1 orang
Cacat dan bekerja	0 orang

Desa Karangsono merupakan Desa yang mayoritas penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai petani dan buruh tani, dimana kondisi kehidupannya masih mengedepankan adat pedesaan dengan taraf kehidupan ekonomi yang masih rendah. Desa Karangsono memiliki potensi yang baik dibidang peternakan, perikanan, perkebunan, pertanian, *home industry* baik kerajinan maupun olahan makanan namun dari kesemuanya masih berjalan

[6] http//kimsekarmuda.com diakses pada 15/2/2019 pukul 13.20 WIB

secara individu dengan sistem manual hal ini dikarenakan masyarakat Desa yang pada umumnya masih belum bisa berjalan mengikuti perkembangan teknologi.

Melihat permasalahan Desa Karangsono diatas pemerintah Desa Karangsono berusaha untuk membangun sistem sehingga semua kegiatan perekonomian masyarakat Desa Karangsono nantinya akan lebih terarah dan terencana sehingga tujuan daripada pemerintah Desa Karangsono untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat Desa Karangsono akan tercapai maka didirkannya Badan Usaha Milik Desa yang nantinya akan menjadi kendaraan perekonomian masyarakat Desa Karangsono untuk dapat menjadi lebih baik.

BUMDes merupakan salah satu strategi pemerintah untuk memperkecil angka kemiskinan masyarakat Desa. Keberadaan BUMDes Lestari di Desa Karangsono Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar dapat menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat yang lebih baik, dengan memberi peluang kepada masyarakat untuk berkembang dan berdaya sesuai dengan kemampuan melalui mobilisasi sumber daya alam dan potensi desa lainnya.

Hingga saat ini dari berbagai sumber menyebutkan bahwa sebagian besar BUMDes di Indonesia masih sebatas berdiri dan belum memiliki aktivitas usaha yang menghasilkan. Hal ini dikarenakan berbagai faktor seperti kurangnya kualitas sumber daya manusia, minimnya relasi sehingga sulit dalam memasarkan produk dan lain-lain. Tetapi disamping itu ada BUMDes yang pengelolaannya sudah baik.

Penting untuk desa menemukan produk unggulan wilayah pedesaan. Produk unggulan yang dimaksud adalah suatu produk yang lahir dari desa tersebut memiliki kualitas yang tak banyak dimiliki wilayah-wilayah yang lain. Seperti Desa Karangsono yang telah memiliki produk unggulan yaitu buah belimbing yang selanjutnya dikelola oleh warga bersama BUMDes Lestari menjadi berbagai macam produk olahan BUMDes dimaksudkan sebagai lembaga usaha yang akan mendorong produktivitas warga desa.

Untuk itu, peneliti melakukan penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar peran BUMDes Lestari bagi pengembangan usaha dan ekonomi masyarakat Desa Karangsono karena BUMDes Lestari sudah lumayan maju dan dapat menambah pendapatan Desa (PAD) sehingga peneliti tertarik meneliti BUMDes Lestari di Desa Karangsono ini.

Adapun permasalahan yang ingin diteliti dalam kegiatan ini meliputi peran BUMDes Lestari dalam mengembangkan usaha dan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat, dampak program BUMDes dalam mengembangkan usaha dan ekonomi melalui BUMDes Lestari dan pandangan ekonomi Islam terhadap BUMDes Lestari dalam mengembangkan usaha dan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat Desa Karangsono Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka judul penelitian ini yaitu: **"Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Mengembangkan Usaha dan Ekonomi Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa Karangsono Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar."**

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dari latar belakang di atas yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut:

1. BUMDes merupakan program Pemerintah Desa dalam meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian yang tergolong masih baru.
2. Minimnya relasi dan kesulitan dalam pemasaran produk.
3. Masih belum optimalnya pemanfaatan semua unit usaha.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan fenomena permasalahan dalam latar belakang di atas maka fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran BUMDes Lestari dalam mengembangkan usaha dan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat Desa Karangsono Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar?
2. Bagaimanakah dampak program pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan usaha dan ekonomi melalui BUMDes Lestari Desa Karangsono Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar?
3. Bagaimanakah pandangan ekonomi Islam terhadap BUMDes Lestari dalam mengembangkan usaha dan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat Desa Karangsono Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami, mendeskripsikan dan menganalisis peran BUMDes Lestari dalam mengembangkan usaha dan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat Desa Karangsono Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar.
2. Untuk memahami, mendeskripsikan dan menganalisis dampak program pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan usaha dan ekonomi melalui BUMDes Lestari Desa Karangsono Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar.
3. Untuk memahami, mendeskripsikan dan menganalisis pandangan ekonomi Islam terhadap BUMDes Lestari dalam mengembangkan usaha dan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat Desa Karangsono Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar.

E. Batasan Masalah

Dengan memperhatikan usaha Pemerintah Desa untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakat Desa Karangsono Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar terkait dengan pemilihan lokasi, penelitian ini membatasi ruang lingkup penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan di Badan Usaha Milik Desa Lestari Desa Karangsono Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar.

2. Penelitian ini terbatas pada pengembangan usaha dan ekonomi melalui BUMDes Lestari dengan menilai peranannya.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan yaitu:

1. Manfaat Secara Teoritis

Penulisan secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai peranan Badan Usaha Milik Desa dalam mengembangkan usaha dan ekonomi yang dimiliki desa melalui pemberdayaan masyarakat sesuai dengan potensi lokal.

2. Manfaat Secara Praktis

   a. Bagi peneliti, sebagai sumber wawasan dan pengalaman serta melatih dalam bertanggungjawab.

   b. Bagi perusahaan, sebagai sumber wawasan keilmuan baru yang dapat digunakan menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi Desa dalam mengetahui lebih jauh perihal peranan Badan Usaha Milik Desa dalam mengembangkan usahanya untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

   c. Bagi penelitian selanjutnya, sebagai pelengkap bagi penelitian yang menggunakan objek (BUMDes) yang sama ataupun subjek (peranan) yang sama.

G. Penegasan Istilah

Adapun penegasan istilah dari judul penelitian ini adalah:

1. Definisi Konseptual

   a. Peran

   Peran merupakan bagian dari tugas utama yang harus dilakukan.[7]

   b. BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)

   Badan Usaha Milik Desa adalah suatu lembaga usaha yang memiliki fungsi untuk melakukan usaha dalam rangka mendapatkan suatu hasil seperti keuntungan atau laba.[8]

   c. Pengembangan

   Pengembangan adalah suatu proses pendidikan jangka panjang, memanfaatkan prosedur sistematis dan terorganisir dimana personil manajerial mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis untuk tujuan umum.[9]

   d. Usaha

   Usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud, pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu.[10]

---

[7] Riva'i, Andi Kardian, *Komunikasi Sosial Pembangunan: Tinjauan Teori Komunikasi Dalam Pembangunan Sosial*, (Pekan Baru: Hawa dan Ahwa, 2016), hal. 14.

[8] Ibrahim, *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kawasan Tambang*, (Yogyakarta: LeutikaPrio, 2018), hal. 13.

[9] Sutadji, *Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Dee Publish, 2010), hal. 85.

[10] https://kbbi.web.id/usaha diakses pada 15/1/2019 pukul 15.25 WIB

e. Ekonomi

Ekonomi atau perekonomian adalah sistem yang menggambarkan terkait kehidupan sehari-hari manusia, yang menyangkut usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan yang terutama adalah berhubungan dengan masalah-masalah pemanfaatan barang-barang material.[11]

f. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan, dan mengelola sumberdaya lokal yang dimiliki melalui kegiatan kolektif dan berjejaring sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial. Pemberdayaan masyarakat bukanlah sebuah proses jangka pendek, namun merupakan proses jangka panjang.[12]

2. Definisi Operasional

Penelitian ini adalah suatu upaya untuk mengetahui peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dilakukan oleh Pengelola BUMDes bersama Pemerintah Desa melalui pemberdayaan masyarakat Desa Karangsono untuk mengembangkan usaha dan ekonomi masyarakat dalam menciptakan tujuannya yaitu meningkatkan taraf kehidupan masyarakat Desa yang lebih baik.

---

[11] Wimmy Halim, *Bangkitlah Pancasila: Sebuah Gagasan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, (Malang: UB Press, 2014), hal. 91.

[12] Ardito Bhinadi, *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Deep Publish, 2017), hal. 23.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan dibuat untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini maka perlu ditentukan sistematika yang baik, untuk membahas semua yang dituliskan diatas maka pembahasan dibagi menjadi enam bab. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi tentang landasan teori yang meliputi tinjauan tentang status dan peran, Badan Usaha Milik Desa, pengembangan usaha dan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, ekonomi Islam dan penelitian terdahulu.

Bab ketiga, menjelaskan tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, tahap-tahap penelitian.

Bab keempat, merupakan hasil penulisan yang berisi tentang gambaran deskripsi latar belakang obyek penelitian, paparan data serta temuan penelitian.

Bab kelima, merupakan pembahasan penemuan-penemuan di lapangan yang kemudian dibandingkan dengan apa yang selama ini ada dalam teori.

Kemudian data tersebut dianalisis sehingga mendapatkan hasil data yang valid dari penelitian yang dilakukan BUMDes Lestari dalam mengembangkan usaha dan ekonomi Desa Karangsono Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar.

Bab keenam, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran/rekomendasi. Bagian akhir, terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, dan daftar riwayat hidup.